

SKRIPSI

**PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM
PEMBUKTIAN KECURANGAN PADA KANTOR BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

**NURHAYATI
10573 04486 13**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan Pada (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : NURHAYATI

No. Stambuk/Nim : 10573 04486 13

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

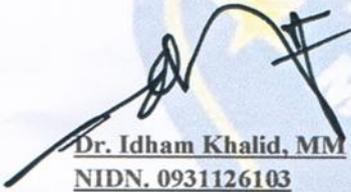
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Senin, 12 Februari 2018 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 13 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Idham Khalid, MM
NIDN. 0931126103


Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA
NBM. 107 3428

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ismail Rasmong, SE., MM
NBM. 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak., CA
NBM. 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Nurhayati, Nim 10573 04486 13 Ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 125 Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada Hari Senin, 12 Februari 2018 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil Awal 1439 H

13 Februari 2018 M

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim SE., M.M

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua Umum : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE., M.Si

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)

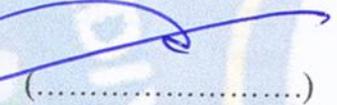
4. Penguji: 1. Drs. Sultan Sarda, MM.

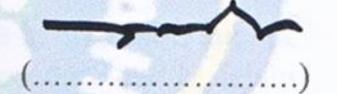
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA

3. Samsul Rizal, SE., MM.

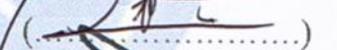
4. Drs. Hamzah Limpo, M.Si.















ABSTRAK

NURHAYATI, 2018, 10573 04486 13" Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakiolan Provensi Sulawesi Selatan. Di bimbing oleh Bapak Ismail Badollahi dan Bapak Idham Khalid.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan di Kantor Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan.

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode analisis regresi linear. Data ini diperoleh dari kuesioner yang di berikan kepada 30 orang audit investigatif.

Metode analisis yang di gunakan yaitu berdasarkan pada rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan maka untuk membuktikan hipotesis tersebut maka di perlukan pengolahan data dengan beberapa metode regresi linear. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis regresi linear data menggunakan analisis statistik dengan. Data penelitian ini di peroleh dari kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian ini di simpulkan, bahwa kemampuan auditor investigatif positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Kata kunci : Kemampuan Auditor Investigatif, efektivitas, prosedur audit, kecurangan

The purpose of writing this thesis is to analyze the influence of investigative auditor ability to effectication implementation audit procedures in the verification of fraud at the office of financial oversight body and development BPKP representative of south sulawesi provice. In this study penulos use simple linear regression analysis method. This data obtained from kuesionwr given to 30 investigative audit people. The method of analysis that is used is based on the formulation of problems and hypotneses that have been presented then to prove hypothesis then in need of data processing with some siple linear regression method. Based on the result of the study concluded, that ability of auditors investigative positive effect on the implemenation of audit procedurs.

Keywords : The ability of investigtive auditor, effectiveness, audit procedures, fraud

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “ Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis, sehingga di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dari segi pengguna kata dan bahasa yang belum memenuhi kaidah yang tepat, maupun dari isi penelitian ini sendiri. Oleh karen itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan bantuan kritikan dan saran sebagai masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari, tanpa bantuan dan motivasi serta bimbingan baik moril maupun materi dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA sebagai ketua jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Dr. Idham Khalid, MM sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Orang tua penulis, yang tak mengenal lelah untuk membimbing penulis agar menjadi manusia yang berdaya guna dan tak henti-hentinya memberikan bantuan doa, moril, serta materilnya.
7. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013, Harel, Rahmi, Ruslan, Ilyas, Ilham, Daus, Masri, Anca, Piati, Yusanti, Ratna, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

Saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2018

Nurhayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Auditing.....	11
1. Pengertian Auditing	11
2. Peran Auditing	14
3. Tujuan Auditing	15
4. Jenis Audit.....	15
5. Standar Auditing	17

B.	Audit Investigasi	18
1.	Pengertian Audit Investigasi	18
2.	Pendekatan Audit Investigasi	19
3.	Standar Audit Investigasi	21
C.	Kecurangan	21
1.	Pengertian Kecurangan	21
2.	Kecurangan Berdasarkan Pelakunya	22
3.	Jenis-Jenis Kecurangan	23
D.	Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan	24
1.	Pengertian Efektivitas	24
2.	Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi	26
E.	Penelitian Terdahulu	29
F.	Kerangka Pikir	34
G.	Hipotesis	35
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	36
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B.	Jenis dan Sumber Data	36
C.	Teknik Pengumpulan Data	37
D.	Defenisi Operasional Variabel	37
E.	Populasi Dan Sample	37

F. Variabel Penelitian.....	38
G. Uji Kualitas Data	39
H. Metode Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	44
A. Sejarah Berdirinya BPKP Perwakilan Sulsel	44
B. Visi dan Misi BPKP Perwakilan Sulsel	48
C. Tugas dan Fungsi	49
D. Struktur Organisasi.....	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Analisis	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Bentuk <i>Mapping</i>	32
Tabel 5.2 Sebaran Data Penelitian	59
Tabel 5.3 Jenis Kelamin.....	60
Tabel 5.4 Umur Responden.....	60
Tabel 5.5 Pendidikan Responden	60
Tabel 5.6 Lama Bekerja	61
Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas	62
Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas	63
Tabel 5.9 Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinieritas	65
Tabel 5.10 Hasil Perhitungan Regresi	67
Tabel 5.11 Uji Koefisien Determinasi.....	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 5.3 Grafik Normal <i>Probability Plot</i>	64
Gambar 5.4 Grafik Scatter Plot.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia pada berbagai aspek kehidupan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat tidak boleh ketinggalan dari proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, antara lain pembangunan.

Semakin berkembangnya zaman, semakin canggih dan modernnya alat elektronik saat ini, semakin banyak pula kasus-kasus kecurangan yang ada di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera perlu secara terus menerus di tingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan segala jenis kejahatan. Kecurangan adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh satu atau lebih orang yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain.

Kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan atau pun lembaga pemerintahan mulai terdeteksi dan terbongkar berkat peran aktif auditor. Pada praktiknya, meskipun internal audit dan pengendalian intern sebuah manajemen perusahaan atau lembaga pemerintahan sudah dirancang dengan baik belum tentu mampu menjamin bahwa perusahaan atau lembaga

Pemerintah di antaranya perilaku karyawan/pegawai, pemborosan, dan penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*). Tindak kecurangan yang semakin sering terjadi di sebabkan oleh pelaku kecurangan semakin pandai menyembunyikan kecurangan yang di lakukannya. Bahkan praktik kecurangan sudah di kemas dengan terencana oleh jajaran manajemen perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka.

Di sinilah pentingnya adanya pengendalian intern dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan di mana peran seorang internal auditor, dengan tugas dan wewenang yang di miliki dapat berperan dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan pada lembaga atau perusahaan ia bekerja. Oleh karena itu, untuk dapat mendeteksi dan mencegah kecurangan internal auditor harus memiliki keahlian sebagai eksistensi dari keterampilan dan pengetahuan mengenai gejala pasti dalam mengindikasi kecurangan dan keahlian untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam mendeteksi kecurangan perlu didukung kemampuan auditor di antaranya kompetensi, pengalaman, independensi, dan skeptisisme profesional. Auditor harus mempunyai kemampuan tersebut untuk menemukan adanya indikasi kecurangan yang kemungkinan terjadi.

Efendy (2010: 18) mendefenisikan kompetensi sebagai keterampilan dari seorang ahli. Di mana ahli di defenisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang di peroleh dari pelatihan dan pengalaman. Auditor harus dituntut memiliki

pengetahuan dan pengalaman audit untuk mencapai kompetensi profesionalnya dalam pemeriksaan.

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan krisis juga kecurangan dengan tetap menunjang hak asasi manusia khususnya untuk masyarakat Indonesia. Di samping itu, dengan semakin besarnya perkembangan zaman dalam memberantas korupsi, Indonesia semakin menunjukkan titik terang yang baik, dengan adanya dorongan dari pihak pemerintah untuk membentuk (BPKP) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan untuk mengawasi dan menyelidiki keadaan keuangan instansi pemerintah maupun swasta. Pemerintah juga membentuk suatu badan khusus dalam memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK, BPK, dan BPKP serta pengadilan tinggi harus mampu membuktikan adanya kecurigaan mereka kepada seseorang, tentang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Dalam rangka melaksanakan tugas di bidang

pengawasan tersebut, BPKP melaksanakan kegiatan di bidang keinvestigasian, seperti Audit Investigatif, Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Audit Klaim, Audit Eskalasi/Penyesuaian Harga, Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, serta berbagai kegiatan pencegahan korupsi lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kemampuan auditor investigatif terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Herman (2008) meneliti tentang pengaruh keadilas organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan. Hasil penelitiannya adalah keadilan organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan pada kantor cabang utama bank pemerintah di Kota Padang.

Wusyang, Nongoi dan Pontoh (2012) meneliti tentang analisis penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terhadap pencegahan pengungkapan *fraund* dalam pengelolaan keuangan daerah pada perwakilan BPKP provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitiannya adalah Penerapan Akuntansi forensik terhadap pencegahan (preventif) *fraud* dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Utara.

Pratiwi (2015) meneliti tentang pengaruh dan pengendalian investigatif terhadap evektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*, yang berarti bahwa semakin meningkat kemampuan auditor

investigatif maka semakin meningkat efektivitas suatu pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

Penugasan audit tersebut di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kepala BPKP melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor: 1314/K/D6/2012 menerbitkan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang merupakan norma yang menjadi pedoman bagi auditor BPKP dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan dan memantau tindak lanjut penugasan bidang investigasi, dengan tujuan tercapainya produk bidang investigasi yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Faktor keahlian lain yang berpengaruh dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan adalah pengalaman. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan di Indonesia berdasarkan SK Menkeu No. 17/PMK.01/2008. Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang di peroleh selama pendidikan namun juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Tentu tidak mengherankan apabila cara pandang dan menanggapi informasi

yang di peroleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor yang berpengalaman dan auditor yang kurang berpengalaman berbeda. Auditor yang sudah memiliki pengalaman audit di yakini mampu mendeteksi kecurangan karena pengalamannya dalam menghadapi berbagai kasus peristiwa yang wajar maupun tidak wajar. Semakin banyak pengalaman yang di miliki auditor semakin besar kemampuan auditor dalam mengatasi dan menganalisis masalah berikut penyelesaiannya.

Salah satu prioritas yang di atur dalam standar pelaksanaan audit adalah peran dan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kehati-hatian profesional, kewajiban auditor untuk meyakini bahwa tidak terdapat kesalahan sajian yang bersifat material yang di sebabkan oleh perbuatan *fraud* dan atau ketidak patutan (Nurharyanto, 2016).

Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, dengan serangkaian ketentuan, profesi auditor harus independen dalam melakukan audit. Setyaningrum (2010:43) menyatakan bahwa dalam hubungan antara independensi auditor terhadap tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan dan kekeliruan laporan keuangan di tinjau dari aspek-aspek independensi yang berupa kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai fakta yang ditemui dalam auditnya. Aspek ini di sebut dengan independensi dalam kenyataan atau *independence in fact*, artinya seorang auditor harus mengungkapkan tentang temuan apa yang di dapat dari laporan keuangan yang di susun oleh manajemen apakah laporan keuangan terjadi suatu kesalahan atau ketidak beresan sesuai

dengan temuan atau fakta yang ada. Independensi merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor jadi dalam menilai kewajaran suatu laporan keuangan seorang auditor tidak mudah di pengaruhi oleh pihak manapun.

Menyadari pentingnya peran auditor dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeliminasi sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Meskipun auditor tidak dapat menjamin suatu kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya untuk mendeteksi kecurangan tersebut sekaligus memberi solusi jitu kepada manajemen mencegah terjadinya kecurangan.

Audit investigatif merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tindak pidana yang berupa manipulasi bidang keuangan demi memperkaya diri sendiri, orang lain maupun perusahaan yang berdampak pada kerugian Negara. Tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan. Dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan.

Hasil pengawasan yang dilakukan di lapangan pada kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan di laporkan kepada presiden selaku kepala pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga di perlukan oleh para penyelenggara pemerintah lainnya termasuk

provinsi dan kabupaten/kota dalam penca;paian dan peningkatan kinerja instansi yang di pimpinnya .

Tugas pokok dari kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan (BPKP).

- a. Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah.
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Perwakilan BPKP Privinsi Sulawesi Selatan

- a. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
- b. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD.
- c. Pengawasan terhadap badan-badan lain yang didalmnya terdapatkepentingan pemerintah dan badan usaha mili8k daerah atas permintaan, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan serta kontraktor bagi hasil

dan kontrak kerja sama dan pinjaman/bantuan luar negeri yang di terima pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah.
- e. Pembinaan kapabilitas pengawasan Intern pemerintah
- f. Pengelolaan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan nrgara Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dan

Kemampuan Auditor investigatif memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan yaitu sebesar 0,508 atau 50,8%. Dari hasil tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa kemampuan Auditor Investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan audit dalam membuktikan tidak kecurangan sangat efektif dari analisis data yang di peroleh bahwa kemampuan auditor investigatif termasuk kategori baik karen berdampak positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

Apakah kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada Kantor BPKP Perwakilan Povinsi Sulawesi Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan auditor investigatif berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada kantor

Baddan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca terkait dengan masalah dalam penelitian ini.
 - b. Dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pengauditan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang auditor investigatif dan pengalaman auditor dan pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.
 - b. Memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaanya
3. Manfaat kebijakan
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menagani terjadinya kecurangan
 - b. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para auditor investigatif dalam kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam pelaksanaan prosedur aud

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Auditing

1. Pengertian Auditing

Konrath (2002) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Arens, dkk (2008:4) mendefinisikan *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

Agoes (2012) mendefinisikan auditing sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts mendefinisikan auditing sebagai proses sistematis pencarian dan pengevaluasian secara objektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meyakinkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut

informasi tambahan. Audit di maksudkan untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan lebih bergantung pada informasi (dalam hal ini laporan keuangan) yang sudah disusun oleh pihak lain (Simamora, 2002).

Pemeriksaan atau *auditing* dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit ini dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor.

Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan berikut ini :

Suatu proses sistematis auditing merupakan suatu proses sistematis, berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan berurutan.

Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Sebagai contoh, suatu badan usaha membuat pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor melakukan audit atas pernyataan yang dibuat oleh badan tersebut. Dalam auditnya, auditor tersebut melakukan proses sistematis untuk memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan yang disajikan oleh badan tersebut dalam laporan keuangannya, dan mengevaluasinya secara objektif, tidak memihak baik kepada pemberi kerja (manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit).

Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi maksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang umumnya terdiri dari lima laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat berupa laporan biaya dari pusat pertanggung jawaban tertentu dalam perusahaan.

Menetapkan tingkat kesesuaian pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat di kualifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. Auditing yang di laksanakan oleh auditor independen menggunakan menyatakan kesesuaian antara kriteria dengan pernyataan yang di hasilkan oleh proses akuntansi. Sebagai contoh, auditor independen memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang di sajikan oleh suatu perusahaan adalah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Kriteria yang telah di tetapkan standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang di buat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang di tetapkan oleh manajermen, GAAP yang di tetapkan oleh FASB, serta badan pengatur lainnya.

Penyampaian hasil di peroleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah di tetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang di buat oleh pihak audit. Pemakai yang berkepentingan dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai keuangan seperti pemegang saham, manajemen, caloninvestor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

2. Peran Auditing

Pelaporan keuangan (*financial reporting*) dan akuntansi yang andal membantu masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dengan cara yang efisien (Simamora,2002). Tujuan utamanya adalah mendistribusikan sumber daya modal yang terbatas kesektor produksi barang dan jasa yang permintaannya besar. Sumber daya ekonomik tertarik pada industri, kawasan geografis, dan entitas organisasional yang parameter finansialnya menunjukkan sebagai sanggup memakai sumber daya ekonomik tersebut secara paling baik. Di lain pihak, akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai akan menyembunyikan dan menyuburkan keborosan dan inefisiensi sehingga menghambat alokasi efisien terhadap sumber daya ekonomik.

Kontribusi auditor independen adalah membubuhkan kredibilitas atas informasi. Dalam hal ini kredibilitas berarti bahwa informasi dapat dipercaya sehingga bias di andalkan oleh pihak luar seperti pemegang saham, kreditur, pelanggan, dan pihak yang berminat lainnya. Permintaan akan hasil auditing

berasal dari faktor-faktor berikut: kompleksitas, jarak, dan bias dan motif penyedia informasi.

3. Tujuan Auditing

Tujuan auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,2001;110) dinyatakan bahwa tujuan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta kesesuaian prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan akhir dari proses audit adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca membaca sebuah laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2002:72) tujuan umum atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien di sajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Karena kewajaran laporan keuangan sangat di tentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan

4. Jenis Audit

Di tinjau luasnya pemeriksaan Mulyadi (2002:30) menyatakan ada tiga jenis audit yang umum di laksanakan. Ketiga jenis tersebut yakni:

- a. Audit operasional (*operational audit*)

Merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- 1) Mengevaluasi kinerja
- 2) Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- 3) Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

b. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan kapankah yang di audit sesuai dengan kondisi peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya di laporkan kepada pihak yang berwenang membuktikan kriteria. Audit kepatuhan banyak di jumpai dalam pemerintah.

c. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Merupakan audit yang di lakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang di sajikan oleh klien untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas standar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut di sajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagi kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.

5. Standar Auditing

Standar *auditing* adalah sepuluh standar yang di tetapkan dan di sahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya.

Sepuluh Standar *Auditing* yang telah di tetapkan dan di sahkan oleh IAI Ikatan Akuntan Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 ini, terbagi menjadi tiga kelompok yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum meliputi keahlian dan mencakup keahlian dan kemahiran serta masalah teknis audit. Standar pekerjaan lapangan mencakup hal-hal yang harus di lakukan pada saat pekerjaan lapangan. Sedangkan standar pelaporan mencakup hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil audit.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka auditor di Indonesia harus mengikuti standar yang ditetapkan. Sedangkan untuk audit investigasi, standar yang di gunakan juga mengacu pada standar *auditing* umum tetapi memiliki perbedaan dalam standar pelaporannya. Dalam audit investigasi, standar pelaporannya meliputi kewajiban dalam membuat laporan, cara dan saat pelaporan, bentuk dan isi laporan, kualitas laporan, pembicaraan akhir dengan audit serta penerbitan dan distribusi laporan (Pusdiklatwas BPKP, 2010:58).

Berdasarkan hal tersebut, maka auditor investigatif dapat di katakan memiliki kemampuan yang kompeten dalam mengungkap suatu tindak kecurangan apabila auditor tersebut telah mengikuti dan menerapkan standar-standar yang telah ditetapkan.

B. Audit Investigasi

1. Pengertian Audit Investigasi

Menurut Tuanakotta (2012:322) pengertian investigasi yaitu sebagai berikut.

Investigasi secara sederhana dapat di definisikan sebagai upaya pembuktian. Umumnya pembuktian ini berakhir di pengadilan dan ketentuan hukum (acara) yang berlaku, diambil dari hukum pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa audit investigasi ini berhubungan dengan tugas auditor untuk mengungkap kecurangan. Tiga elemen yang dapat membantu melengkapi informasi yaitu dimana *fraud* terjadi, kemampuan auditor untuk merekonstruksi jalannya peristiwa kecurangan, dan pengetahuan dari orang yang melihat atau mengetahui jalannya kecurangan.

Sulistyowati (2003:13) mengemukakan bahwa. Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan berpikir analitis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci. Selain keahlian non teknis tersebut, fraud auditor membutuhkan keahlian khusus yaitu sikap ingin tahu (*Curiosity*), curiga profesional (*professional skepticism*). Ketangguhan (*persistence*), kreativitas (*creativity*), kepercayaan (*confidence*), dan pertimbangan profesional (*professional judgement*).

Dalam Pernyataan Standar Auditing No.4 (PSA No.4) pada Standar Umum ketiga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan

melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Tuanakotta (2012:349) mengemukakan bahwa Auditor Investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian yang meliputi pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila Auditor Investigatif di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian sebagai Auditor Investigatif, maka auditor tersebut telah mampu melaksanakan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan yang efektif.

2. Pendekatan Audit Investigatif

Berdasarkan standar akuntansi pemerintah komponen-komponen laporan keuangan sebagai berikut:

a. Audit investigatif reaktif

Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi misalnya dari auditor lain

yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan.

b. Audit investigatif Proaktif

Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Auditor secara aktif mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi-informasi yang diperoleh untuk menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan secara lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Selain itu, audit investigatif yang bersifat proaktif juga dapat menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung sehingga pengumpulan bukti untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan. Hasil dari suatu audit investigatif, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif dapat digunakan sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan kejahatan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil audit tersebut, aparat penegak hukum akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

3. Standar Audit Investigatif

Akuntan publik memiliki Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). SPAP kemudian memuat standar-standar audit, attestasi, pengendalian mutu dan lain-lain. Namun, SPAP tidak mengatur secara khusus audit investigatif atau *fraud* audit. Standar dapat digambarkan secara sederhana sebagai ukuran mutu, oleh sebab itu dalam pekerjaan audit, para auditor ingin menegaskan adanya standar tersebut sehingga pihak-pihak terkait yang berkepentingan dapat menilai kinerja daripada auditor tersebut.

C. Kecurangan

1. Pengertian Kecurangan

Kecurangan merupakan salah satu bentuk *irregularities*. Secara singkat *fraud* dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.

Berdasarkan definisi tersebut, kecurangan (*fraud*) dapat disimpulkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain.

2. Kecurangan Berdasarkan Pelakunya

Secara garis besar kecurangan berdasarkan pelakunya terbagi atas dua kelompok menurut Tunggal (2011), adalah sebagai berikut:

a. Pihak dalam perusahaan (*internal*)

1) Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Contoh: perusahaan yang membuat neraca palsu dengan menaikkan nilai aktiva serta tidak mencatat hutang. Hal ini dilakukan biasanya untuk perusahaan yang ingin menarik investor.

2) Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*). Contoh: Seorang pegawai di bidang persediaan yang juga memegang catatan persediaan. Dengan kesempatan yang ada, mereka dapat mengambil item-item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

b. Pihak luar perusahaan (*external*)

Pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, supplier, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contoh: *Supplier*, kecurangan yang dilakukan berupa kecurangan pada saat pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli, seperti kualitas barang berbeda, jumlah tidak sesuai, pengiriman tidak tepat waktu, penagihan berulang-ulang yang dilakukan pada transaksi sama.

Sedangkan, oleh debitur sebagai penerima piutang pada umumnya melakukan penggelapan barang, pembayaran piutang tidak sesuai perjanjian.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Namun, kecurangan timbul bukan karena tanpa alasan. Umumnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

3. Jenis-jenis Kecurangan

Amrizal (2004) mengungkapkan menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* kecurangan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*.

b. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran

biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). Pada kasus ini biasanya mudah untuk dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut *ACFE*, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

D. Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

1. Pengertian Efektivitas

Abdurahmat (2003:92) mengemukakan pengertian efektivitas. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi.

Audit investigasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi karena audit investigasi ini dilakukan oleh seorang ahli akuntansi dan audit dalam pengungkapan kecurangan tersebut. Audit investigasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit invetigasi, penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigasi adalah memperoleh bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigasi haruslah seefektif mungkin. Hal ini sangat terkait dengan waktu penahanan tersangka yang cukup terbatas.

Sedangkan dalam mencapai efektivitasnya dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini

sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigasi dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan.

2. Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

Syafi'i (2002) menjelaskan bahwa audit investigasi dilakukan atas dasar kewenangan yang ada pada lembaga audit, satuan pengawas, permintaan dari DPR, dewan komisaris atau manajer suatu perusahaan atau ketentuan lain sebagai dasar pelaksanaan.

Pada umumnya laporan audit investigasi berisi: dasar audit, temuan audit, tindak lanjut dan saran. Sedangkan laporan audit yang akan diserahkan kepada kejaksaan, dalam temuan audit memuat: modus operandi, sebab terjadinya penyimpangan, bukti yang diperoleh dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan.

Wahono (2011:7) menjelaskan terdapat empat mekanisme dalam melakukan audit investigasi, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi korupsi. Audit investigatif yang bersifat proaktif dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diaudit. Terdapat sejumlah besar data dan informasi yang dapat dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi adanya indikasi kecurangan dan kejahatan. (misalnya data aliran dana keluar perusahaan, data kekayaan orang-orang yang menjadi *key person* di perusahaan, informasi dari media massa dan lain-lain). Selanjutnya berbagai data dan

informasi tersebut dianalisis sesuai dengan tujuan dari audit investigatif yang akan dilaksanakan.

- b. Mengembangkan hipotesis kejahatan dan merencanakan audit; diantaranya:
 - 1) Melakukan analisis terhadap perkembangan produk perusahaan di pasaran.
 - 2) Mengumpulkan informasi mengenai siapa yang berwenang atau melakukan otorisasi uang keluar dengan nominal yang signifikan dan sebagainya.
- c. Melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis. Dalam melaksanakan audit investigatif maka auditor harus menerapkan pendekatan yang relatif berbeda dengan pendekatan yang dilaksanakan dalam audit non investigatif, diantaranya adalah:
 - 1) Auditor melaksanakan wawancara terhadap saksi yang mendukung audit dan menganalisa dokumen yang tersedia.
 - 2) Auditor menggunakan bukti tidak langsung yang tersedia untuk meyakinkan saksi-saksi agar bisa mendapatkan bukti-bukti yang secara langsung menunjukkan terjadinya kecurangan atau kejahatan.
 - 3) Jika sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup, auditor dapat mewawancarai orang-orang yang diduga melakukan kecurangan atau kejahatan terutama untuk membuktikan adanya unsur niat atau kesengajaan.

- d. Penyusunan laporan hasil audit. Setelah selesai melaksanakan audit maka ketua tim audit menyusun laporan audit investigatif, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan penyusunan laporan audit investigatif sebagai berikut:
- 1) Akurat dalam arti bahwa seluruh materi laporan misalnya menyangkut kecurangan atau kejahatan yang terjadi serta informasi penting lainnya, tempat atau tanggal adalah benar sesuai dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.
 - 2) Jelas dalam arti bahwa laporan harus disampaikan secara sistematis dan setiap informasi yang disampaikan mempunyai hubungan yang logis.
 - 3) Berimbang dalam arti bahwa laporan tidak mengandung bias atau prasangka dari auditor yang dapat mempengaruhi auditor. Laporan hanya memuat fakta-fakta dan tidak memuat opini atau pendapat pribadi auditor.
 - 4) Relevan dalam arti bahwa laporan hanya mengungkap informasi yang berkaitan langsung dengan kecurangan atau kejahatan yang terjadi.
 - 5) Tepat waktu dalam arti bahwa laporan harus disusun segera setelah pekerjaan lapangan selesai dilaksanakan dan segera disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian terkait dengan kemampuan dan pengalaman auditor investigatif dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*, diantaranya sebagai berikut.

Handayani(2009) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan intern khususnya pengendalian intern terhadap kecurangan (*fraund*) pada PT.Bank bukopin cabang duri Riau.Hasil penelitiannya pemeriksaan intern bekerja guna membantu pimpinan perusahaan dalam melakukan penelitian atas pengendalian manajemen dan pelaksanaanya,serta meberikan saran tentang cara pelaksanaan operasional secara efektif dan efisien.

Dewi dan Ramantha (2016) meneliti tentang profesionalisme sebagai pemoderasi pengaruh kemampuan investigatif pada pembuktian kecurangan oleh auditor.Hasil penelitiannya data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung kekantor BPKP RI perwakilan provinsi Bali.Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 74 kuesioner.Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 70.

Anggiriawan (2014) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja,skeptisme propesional dan tekanan waktu terhadap kemampun auditor dalam mendeteksi *fraund* (studi empiris pada kantor akuntan publik di diy).hasil penelitianny adalah seluruh auditor independen di wilayah DIY yang berjumlah 133 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *convenience sampling*.

Suryani dan Helvina (2004) meneliti tentang pengaruh pengalaman, resiko audit, dan keahlian audit terhadap pendeteksian kecurangan (*fraund*) oleh auditor (survey pada kap di Bandung). Hasil penelitiannya telah teruji secara statistik memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (*fraund*) oleh auditor dan memiliki pengalaman dan keahlian audit.

Yusrianti (2002) meneliti tentang pengaruh pengalaman audit, beban kerja, *task specific knowledge* terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan mengirim kuesioner langsung dan melalui jasa pos kepada responden.

Annisya, Linrinasari dan Asmaranti (2016) meneliti tentang pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan *fraund diamond*. Hasil penelitiannya kemampuan untuk mengganti direksi *proxy* terhadap laporan keuangan penipuan.

Widiyastuti dan Pamudji (2000) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraund*). Hasil penelitiannya untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraund*).

Rustiarni dan Novitasari (2014) meneliti tentang persepsi auditor atas tingkat efektivitas *read flags* untuk mendeteksi kecurangan. Hasil penelitiannya hanya sebagian kecil auditor yang menyadari pentingnya penggunaan indikator kecurangan tersebut.

Prasetyo (2013) meneliti tentang pengaruh *read flags*, skeptisme profesional auditor, kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (studi empiris pada kantor

akuntan publik di PEKANBARU, PADANG dan MEDAN yang terdaftar di iapi 2013). Hasil penelitiannya yaitu *read flags*, skeptisme, profesional auditor, kompetensi, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Meneliti tentang kecurangan yang terjadi baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda, sinyal, atau *red flags* suatu tindakan yang di duga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan

Rahayu dan Godono (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan: sebuah riset campuran dengan pendekatan sekuensial eksplanatif. Hasil penelitiannya hasil pengumpulan kuesioner, karakteristik responden, statistik deskriptif, dan hasil penelitian.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Bentuk *Mapping*

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Wayan Rustiarni dan Ni Luh Gde Novitasari (2014)	Persepsi Auditor Atas Tingkat Efektifitas <i>ReadFlags</i> Untuk Mendeteksi kecurangan	Pendekatan penelitian digunakan adalah kuantitatif teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data menggunakan regresi linear berganda	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan tujuan yang lebih mengarah pada generalisasi, menjelaskan fenomena secara lebih terukur, serta lebih terukur
2.	Wuri Wadayani (2009)	Pengaruh pemeriksaan intern khususnya pengendalian intern terhadap kecurangan (<i>fraud</i>) pada PT. Bank Bukopin Cabang Duri Riau	Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei, analisis koefisien korelasi rank spearman, koefisien, d eterminasi, uji hipotesis	Pemeriksaan intern bekerja guna membantu pimpinan perusahaan dalam melakukan penilaian atas pengendalian manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran tentang cara pelaksanaanh operasional secara efektif dan efisien
3.	Ni Wayan Puspita Dewi dan I Wayan Ramantha (2016)	Prefesionalisme Sebagai Pemoderisasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan oleh Auditor	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih	Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung ke kantor BPKR RI Perwakilan Provinsi Bali. Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 74 kuesioner. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 70
4.	Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2000)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan menggunakan software <i>SmartPLS</i> .	Pengaruh yang signifikan juga tampak pada variabel independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi

		kecurangan (<i>Fraud</i>)	Alasan digunakan PLS dalam penelitian ini adalah karena PLS dapat menganalisis dan menguji hubungan di antaravariabel	kecurangan (<i>fraud</i>). Sedangkan pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (<i>fraud</i>) juga mempunyai pengaruh yang signifikan
5.	Sandi Prasetyo (2013)	Pengaruh <i>Red Flags</i> Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, Dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (studi empiris pada kantor akuntan publik di Pekanbaru, Padang, dan Medan yang terdaftar di iapi 2013)	Penelitian ini adalah penelitian survei penulis hanya meneliti sample dari suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah KAP di wilayah Pekan Baru Padang dan Medan dan waktu penelitian diperkirakan 2 bulan	Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan antara lain dengan melihat tanda, sinyal atau <i>red flags</i> suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial
6.	Hasni Yusrianti (2015)	Pengaruh Pengalaman audit, beban, kerja, task specific knowledge terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan	Teknik penyajian data menggunakan kuesioner analisis data mencakup statistik deskriptif, uji validitas. Hasil uji dari reabilitas, hasil uji normalitas data, hasil pengujian hipotesis.	pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan mengirim kuesioner secara langsung dan melalui jasa pos kepada responden.
7.	Siti Rahayu dan Godono (2012)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan Auditor dalam pendeteksian kecurangan	Menggunakan metode kuantitatif dan metodologi kualitatif, dan kuesioner Menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif, metode Kuesioner	Hasil penelitian kuantitatif memaparkan hasil penelitian tahapan kuantitatif berupa hasil pengumpulan kuesioner, karakteristik responden, statistik deskriptif, dan hasil penelitian
8.	Elly Suryani dan Van Ayu Helvinda (2004)	Pengaruh Pengalaman, Risiko Audit, Dan Keahlian Audit Terhadap Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Teknik pengambilan data menggunakan analisis regresi berganda yaitu untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu	Dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji secara persial bahwa hanya variabel pengalaman dan keahlian audit yang

		Oleh Auditor (Survey Pada Kap Di Bandung)	variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat.	telah teruji secara statistik memiliki pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan (<i>fraud</i>) oleh auditor dan memiliki pengalaman dan keahlian audit.
9.	Mafiana Annisya, Lindrianasaridan Yuztitya, Asmaranti (2016)	Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan <i>Fraud Diamond</i>	Menggunakan Meode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian dengan pertimbangan khusus, Metode Analisis Data Menggunakan Metode Statistik Deskriptif	Menganalisis pengaruh tekanan variabel <i>proksi</i> oleh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, kesempatan ditunjukkan oleh sifat industri, <i>razionalization proksi</i> oleh <i>opini audit</i> , dan kemampuan untuk mengganti direksi <i>proxy</i> terhadap laporan keuangan penipuan.
10.	Eko Feri Anggriawan (2014)	Pengaruh Pengalaman Kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi <i>Fraud</i> (studi empiris pada kantor akuntan publik di DIY).	Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal, dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif	Peneliti adalah seluruh auditor independen di wilayah DIY yang berjumlah 133 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah <i>convenience sampling</i> . Dengan teknik tersebut diperoleh sampel sebanyak 45 responden

F. Keangka Pikir



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ungkapakan maka dapat di ambil hipotesis yaitu :“di duga kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan pada kantor BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Selatan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti melaksanakan penelitian selama 2 Bulan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil perusahaan baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tulisan.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka masih memerlukan pengelolaan kembali dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara metode angket (kuesioner), yaitu pemberian daftar pernyataan secara tertutup kepada responden yang lengkap dengan beberapa pertanyaan.
- b. Data Sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah buku, karya ilmiah, dan dokumen/arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*), sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung)

Suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu.

2. Kuesioner

Memperoleh data melalui serangkaian pertanyaan tertulis yang di jawab responden.

D. Definisi Operasional Variabel

Variable penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu, variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Kemampuan auditor investigatif dan variabel terkait (Y) dalam penelitian ini adalah Efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

E. Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya(sugiono, 2012:80).

2. Sample

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2012:81), adapun sampel dalam penelitian ini adalah auditor investigatif di perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Besarnya jumlah sampel di tentukan berdasarkan rumus slovin (Sujarweni 2014:16).

$$n = \frac{N}{1+N\epsilon^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang di perlukan

N = Jumlah anggota populasi

e = standar Error

Apabila jumlah populasi (N) = 30, glate (e) = 0,05 maka jumlah minimum sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan, jumlah sampel adalah sebanyak 30 pegawai, selanjutnya penentuan jumlah contoh untuk setiap unit di lakukan secara proposional berdasarkan jumlah populasi dari setiap departemen.

F. Variabel Penelitian

Pengelompokan variabel-variabel yang termasuk penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu sebagai berikut.

1. Variabel bebas (*independent variabel*). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah kemampuan auditor investigatif di sebut variabel bebas (X).
2. Variabel terikat (*dependent variabel*). Dalam penelitian ini variabel terikat atau adalah efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan Variabel terikat (Y).

Operasional adalah suatu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Sesuai dengan judul

yang di pilih yaitu pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan, maka terdapat variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan auditor investigatif
2. Efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

G. Uji Kualitas Data

a. Uji validitas adalah

Uji validitas di gunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang di ukur. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap pernyataan yang terdiri dari 15 pernyataan untuk variabel X (Kemampuan Auditor Investigatif) dan 15 pernyataan untuk variabel Y (Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan).

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunaka untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam mengungkapkan gejala tertentu. Pengukuran reliabilitas yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran *one shot*.

H. Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Statistik Deskriptif

Statistik itu sendiri mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan, dan menganalisis data sehingga mudah di pahami dan di intrepetasikan. Statistik deskriptif umumnya di gunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (devisiasi standard dan varian) dan koofisien korelasi antar variabel penelitian (Indriantoro & Supomo,1999).

2. Uji Kualitas Data

Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: validitas dan reliabilitas. (Indriantoro & Supomo, 1999). Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu kuesioner di katakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu alat di katakan handal jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuisisioner) melakukan fungsinya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrument (Indriantoro & Supomo,1999). Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi *Pearson Validity* dengan teknik *Product Moment* yaitu setiap skor tiap item di

korelasikan dengan skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka data dapat dikatakan valid.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas di gunakan untuk menguji apakah sampel terdistribusi dengan normal atau tidak, juga untuk menghindari bias. Dalam penelitian ini di lakukan dengan menggunakan uji *P-Plot Normality*, yaitu dengan menetapkan derajat keyakinan ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujiannya adalah jika sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi berdistribusi normal, sedangkan jika sebaran data jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2005).

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini di lakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat varian yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya yang lain. Jika terjadi perbedaan varians, maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas ini di lakukan melalui metode *Scatter plot*, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada *Scatter plot* (Santoso, 2004). Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam regresi memiliki hubungan sempurna atau mendekati sempurna. Pengujian yang baik seharusnya tidak terdapat multikorelasi dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila VIF lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas. Sebaliknya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel jika nilai VIF berada pada kisaran 0,10 sampai 10. Selain itu, multikolinieritas terjadi apabila angka *Tolerance* (TOL) menjauhi 1 (Santoso, 2004).

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

e. Analisis Regresi sederhana

Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner adalah metode regresi sederhana dengan menggunakan program computer SPSS.

Untuk memecahkan masalah pokok sekaligus untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode: Analisis Regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bx + e$$

Y = Efektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

X = Kemampuan Auditor Investigatif

a = Konstanta

b = Koefisien Regrens

e = Erorr

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya BPKP Perwakilan Sulsel

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak lepas dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara ekspresit di tetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (*Regering Accountanstienst*) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat di katakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jendral pada Kementerian Keuangan.

Dengan peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepada Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN di lepas dari Thesauri Jendral dan di tingkatkan kedudukannya langsung di bawah Mentri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan ,dan instansi di bawah kekuasannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran di laksanakan oleh Thesauri Jendral. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 di bentuklah Di rektort Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) Pada Departemen Keuangan. tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jendral.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 70 Tahun 1971 ini, tugas Inspektorat jenderal dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan di terbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN di transformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung Kepada Presiden. Salah Satu Perimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan kedudukan yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tertentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Tahun 2001 di keluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 di sebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit refresif. Kegiatan sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit penegak hukum untuk menghitung kerugian negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan departemen/lembaga sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai good governance.

Sesuai arah Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan reposisi dan revitalisasi BPKP di ikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan Manajemen Pemerintah Menuju Pemerintah Baik dan Bersih.

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintah Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Selain itu presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Menegaskan Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah, meliputi: a. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; b. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak dan Instansi Pemerintah Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan wajib bayar; c. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; d. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; e. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategi di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; f. audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah; g. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; h. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; i. Audit dalam rangka perhitungan keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Visi dan Misi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan

1. Visi dan Misi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Misi BPKP Sulawesi Selatan

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan di lakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula di atur dala Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian di perbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Peerintah Non Kementrian.

- a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasionalguna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi yang Bersih dan Efektif.
- b. Membin Penyelenggraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;dan
- c. Mengembangkan fasilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

C. Tugas Pokok, Fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Aktivitas utama pengawasan merupakan kegiatan (core business) BPKP berupa kegiatan pengawasan yang di lakukan dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta tewujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang di lakukan untuk mendukung aktivitas utama.

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Pelaksanaan audit review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serba pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya di biayai oleh anggaran negara/daerah dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya di biayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan lain dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.

4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat dengan pengawasan intern pemerintah lainnya.
7. Pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembangunan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bada-badan yang didalamnya terdapat kepentingan lain dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor.
11. Pelaksanaan pelatihan, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.

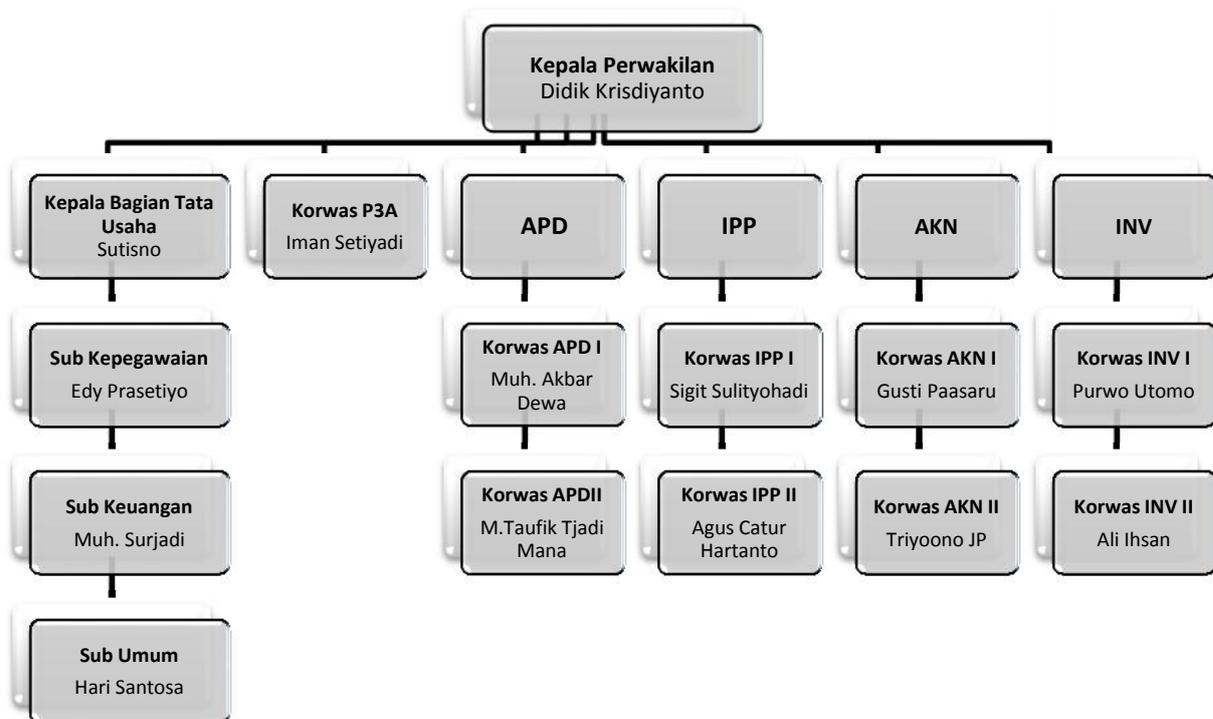
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah.
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persediaan, perlengkapan dan rumah tangga.

D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan

Struktur Organisasi bagi suatu perusahaan sangat mutlak sebagai dasar untuk mengetahui dengan jelas wewenang dan tanggung jawab dari suatu jabatan, sebagai perwujudannya, maka disusun Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. Struktur Organisasi BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan mengatur seluruh tenaga kerja/karyawan sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik dalam suatu sistem kerja yang efektif.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki struktur berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerja BPKP sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2016, serta keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-428/K/SU/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang jumlah koordinator pengawasan pada BPKP Provinsi Sulawesi selatan dengan struktur yang terdiri dari Kepala Perwakilan yang membawahi 1(satu) kepala bagian tata usaha, 4 (empat) kepala bidang

dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi BPKP sebagai berikut:



Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan di pimpin oleh Kepala Perwakilan yang di bantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan 4 bidang yaitu:

1. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala bagian tata usaha di bantu oleh tiga subian yaitu :

- 1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- 3) Kepala Sub Bagian Umum

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang terdiri dari dua orang Koordinator Pengawasan

2. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) yang terdiri dari dua orang Koordinator Pengawasan
3. Bidang Pengawasan Akuntan Negara (AN) yang terdiri dari dua orang Koordinator Pengawasan
4. Bidang Pengawasan Investigasi yang terdiri dari dua orang Koordinator Pengawasan
5. Bidang Pengawasan Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) yang dikoordinasikan oleh seorang Pengawasan Bidang P3A

Masing masing jabatan memiliki tugas yang akan di jabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan
2. Bertugas menjalankan kebijakan umum termasuk didukungnya dalam hal pengambilan keputusan dan mengadakan pengawasan kerja yang ada dalam instansi/kantor.
3. Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada seluruh satuan di lingkungan BPKP. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, dan dokumentasi
 - b) Melakukan urusan kepegawaian
 - c) Melakukan urusan keuangan

- d) Melakukan urusan rumah tangga Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu pada bagian Tata Usaha ini membawahi beberapa Sub Bagian antara lain :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian
 - a) Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
 - b) Penetapan Angka Kredit Auditor
 - c) Pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Auditor
 - d) Penetapan Kenaikan Jabatan dan Alih Jabatan Auditor
 - e) Pengusulan Kenaikan Pangkat
 - f) Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
 - g) Pemrosesan Impassing Gaji
 - h) Pengusulan Pensiun Pegawai
 - i) Pengusulan Peserta Pendidikan dan Pelatihan
 - j) Pengajuan dan Persetujuan Cuti
 - k) Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
 - l) Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3)
 - m) Penyusunan Laporan Gerakan Disiplin Nasional
 - n) Pengusulan Penerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya
 - o) Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian

- p) Pembebasan Sementara dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Auditor
 - q) Pemberhentian dari Jabatan Auditor
 - r) Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - s) Pengusulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat
 - t) Pengusulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Tidak Hormat
 - u) Penyusunan Daftar Susunan Pegawai
 - v) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
 - w) Pengajuan Kartu Pegawai
 - x) Pengelolaan Simpangan Pegawai (SIMPEG)
- 2) Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan neraca pengeluaran rutin dan pembangunan, melakukan tata usaha keuangan dan tugas-tugas kebhendaharaan serta urusan keuangan lainnya.
- 3) Sub Bagian Umum
- a) Penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) / Barang Habis Pakai
 - b) Pemeliharaan Inventaris Kantor
 - c) Pemeliharaan Kebersihan Kantor
 - d) Peminjaman Mobil Dinas
 - e) Pengadaan Barang dan Jasa
 - f) Pengelolaan dan Penggunaan Rumah Dinas
 - g) Pengelolaan Kearsipan

- h) Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungannya
 - i) Pengelolaan Perpustakaan
 - j) Pengelolaan Poliklinik
 - k) Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara (BMN)
 - l) Penyusunan/Pengetikan/Pencetakan dan Pengadaan Penjilitan Pengiriman Surat Dokumen dan Laporan
 - m) Persuratan
4. Koordinator Pengawas (Koorwas) Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
- 1) Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP) berdasarkan PKPT
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan dari BPKP pusat
 - 4) Pelaksanaan pengawasan atas permintaan pihak estern
 - 5) Pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pengawasan
 - 6) Penyusunan laporan berkala bidang sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perwakilan
5. Koordinator Pengawas (Koorwas) Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
- 1) Penyusunan usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang APD berdasarkan PKPT
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan dari BPKP pusat

- 4) Pelaksanaan pengawasan atas permintaan pihak ekstern
- 5) Pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pengawasan
6. Koordinator Pengawas (Koorwas) Akuntan Negara (AN)
 - 1) Penyusunan usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang Akuntan Negara berdasarkan PKPT
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan dari BPKP pusat
 - 4) Pelaksanaan pengawasan atas permintaan pihak ekstern
 - 5) Pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pengawasan
 - 6) Penyusunan laporan berkala bidang sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perwakilan
7. Koordinator Pengawas (Koorwas) Investigasi

Bagian Investigasi mempunyai tugas memeriksa adanya laporan yang terjadi atau di duga adanya penyimpangan dari yang telah diterapkan. Di lakukan penyelidikan saksama untuk memperoleh kebenaran apa sebenarnya terjadi penyimpanganpenyelewengan yang telah di lakukan.
8. Koordinator Pengawas (Koorwas) P3A
 - 1) Monitoring dan pengendalian penugasan
 - 2) Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
 - 3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
 - 4) Penyusunan Laporan Berkala
 - 5) Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

- 6) Validasi TP-III, Input Tindak Lanjut dan Input Surat Penugasan
- 7) Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
- 8) Memfasilitasi Diklat APIP
- 9) Memfasilitasi peningkatan kapabilitas APIP

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Sebaran data penelitian

Penelitian di lakukan dengan menyebarkan 30 kuesioner kepada staf BPKP. Dari 30 kuesioner yang disebarkan, semuanya kembali dan dapat di olah. Adapun tabel sebaran data penelitian dapat di lihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Sebaran Data Penelitian

Keterangan	Presentase (%)
Total kuesioner yang di bagikan	30
Total kuesioner yang di kembalikan	30
Total Kuesioner yang rusak/tidak kembali	0

Sumber : data primer yang diolah, 2017

2. Karakteristik responden

a. Responden berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden digunakan oleh peneliti yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian (Anggraeni, 2010). Gambaran karakteristik karyawan yang menjadi responden penelitian ini dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	13
	Total	30

Sumber: data olah (lampiran 2)

Dari tabel jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki sebanyak 17 atau 56,7% sedangkan perempuan sebanyak 13 atau 43,3%.

b. Responden berdasarkan usia/umur.

Tabel 5.4
Umur Responden

No	Umur	Jumlah
1	Di bawah 30 tahun	3
2	Antara 30 sampai 40 tahun	20
3	Di atas 40 tahun	7
	Total	30

Sumber: data olah (lampiran 2)

Berdasarkan tabel 5.4 kategori usia dari 30 responden yang diteliti, dapat diketahui bahwa responden yang berusia di bawah umur 30 tahun sebesar 3 responden, antara 30 sampai 40 tahun merupakan mayoritas dengan presentase sebesar 10%(3 orang), sedangkan yang berusia antara 3- sampai 40 tahun 66,3%(20 orang), sedangkan di atas 40 tahun sebesar 23,3%(7 orang).

c. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5.5
Pendidikan responden

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sma/smk /diploma 3	2
2	S1	24
3	S2	4
	Total	30

Sumber: olah data(lampiran 2)

Dari tabel 5.5 di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berpendidikan Sma/smk/diploma yaitu sebanyak 2 orang atau (6,7%) dan yang berpendidikan S1 24 orang atau (80%) dan yang berpendidikan S2 4 orang atau (13,3%).

d. Lama Bekerja

Tabel 5.6
Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah
1-10 Tahun	14
11-20 Tahun	16
Jumlah	30

Sumber : Data Primer (Kuesioner), diolah 2017

Berdasarkan table 5.6 yakni deskripsi identitas responden berdasarkan lama bekerja. Menunjukkan bahwa responden yang memiliki lama bekerja 1-10 tahun sebanyak 14 (46,66%) orang, 11-20 tahun orang sebanyak 16 (53,33%) orang. Dari hasil tabel diatas. Menunjukkan bahwa 11-20 tahun didominasi oleh pegawai yang lama bekerja.

3. Deskriptif Hasil Penelitian

Pengumpulan data mulai di dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017 dengan menyebarkan kuesioner. Selain penyebaran kuesioner penulis juga mengambil data sekunder seperti struktur organisasi, jumlah pegawai, uraian tugas dan tanggung jawab dan lain-lain yang di butuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua jumlah pegawai yang bekerja pada kantor BPKP Sulawesi Selatan, dimana total jumlah keseluruhan pegawai yang menjadi responden adalah sebanyak 30 orang. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi

kerja karyawan pada kantor BPKP Sulawesi Selatan. Selanjutnya dijelaskan melalui masing – masing indikator.

4. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software statistik, nilai validitas dapat dilihat pada kolom Corrected Item-Total Correlation. Jika angka korelasi yang di peroleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Berdasarkan uji validitas dapat di simpulkan bahwa seluruh item pernyataan untuk mengukur masing-masing variabel penelitian di nyatakan valid. Hal ini dapat di lihat pada r_{hitung} lebih besar r_{tabel} dimana nilai untuk sampel sebanyak 30 responden adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7
Uji Validitas Variabel

Nilai	Variabel	Indikator	Nilai	Keterangan
	R	r_{hitung}	r_{tabel}	
Kemampuan auditor	P1	0,518	0,6310	Valid
investigatif	P2	0,629	0,6310	Valid
X	P3	0,637	0,6310	Valid
	P4	0,651	0,6310	Valid
	P5	0,622	0,6310	Valid
	P6	0,743	0,6310	Valid
Efektifitas pelaksanaan	P7	0,655	0,6310	Valid
Prosedur audit	P8	0,577	0,6310	Valid
Dalam pembuktian	P9	0,636	0,6310	Valid
kecurangan	P10	0,436	0,6310	Valid
Y	P11	0,702	0,6310	Valid
	P12	0,702	0,6310	Valid

Sumber : Output SPSS *for windows* berdasarkan hasil penelitian, 2017

b. Uji Reliabilitas

Dari data berikut dapat di lihat bahwa hasil perhitungan uji reabilitas menunjukkan aplpha cronbach's lebih besar dari 0,6 maka dapat dinyatakan instrumen tersebut reliable. Setelah dilakukan uji validitas,langkah selanjutnya adalah uji reabilitas data yaitu dengan melihat nilai cronbach;s alpha. Uji reabilitas di lakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat di percaya. Secara umum suatu instrumen di katan bagus jika memiliki koefesien cronbachsw alpha $> 0,6$ maka kuesioner penelitian tersebut di nyatakan reliabel. Hal ini dapat di lihat pada tabel 6 untuk sampel sebanyak 30 respoden adalah sebagain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	CronbachAlfa	Keterangan
Kemampuan auditor investigatif(X)	0,844	Reliable
Efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan(X)	0,840	Reliable

Sumber: Output SPSS for Windows berdasarkan hasil penelitian,2017

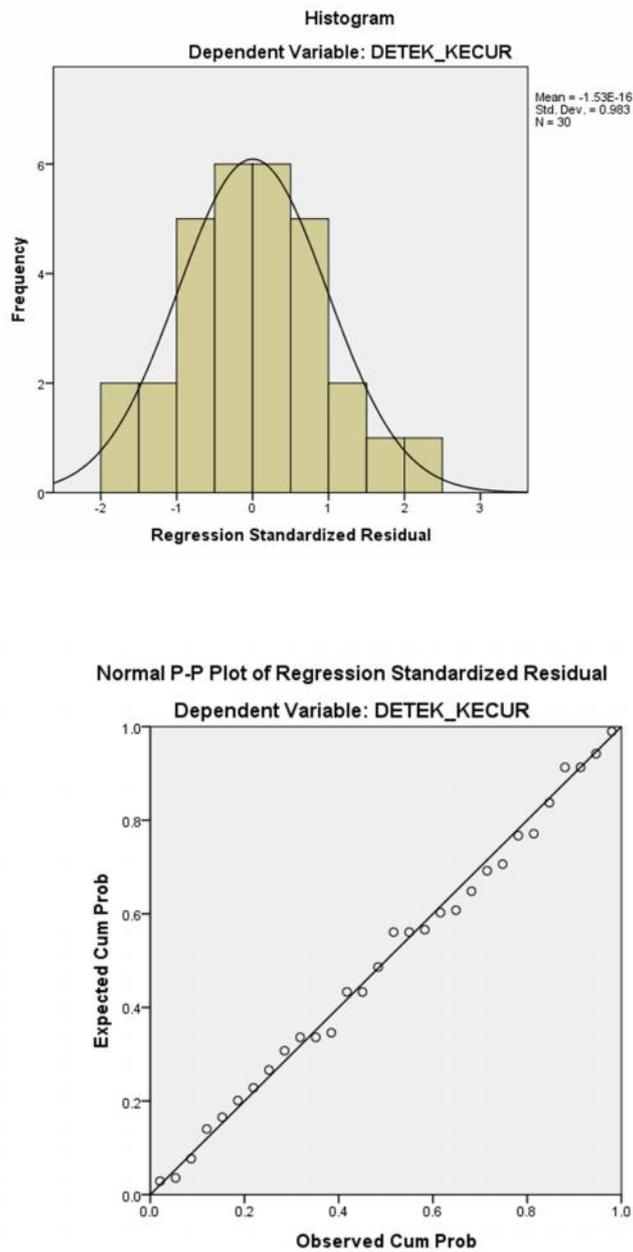
Berdasarkan tabel 5.9 dapat di simpulkan bahwa semua variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah riabel, karena memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar dari pada 0,60 (ghosli.2006).

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas di lakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau di ambil dari populasi normal.



Gambar 5.3
Grafik Normal Probability Plot

Sumber: data olah (lampiran 5)

Dari gambar 5.3 plot di atas, kita dapat melihat bahwa data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan poladistribusi normal. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikoliniartas

Uji multikoloniertas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas(indevenden). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas(tidak terjadi multikolonieritas).

Tabel 5.10
Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinieritas

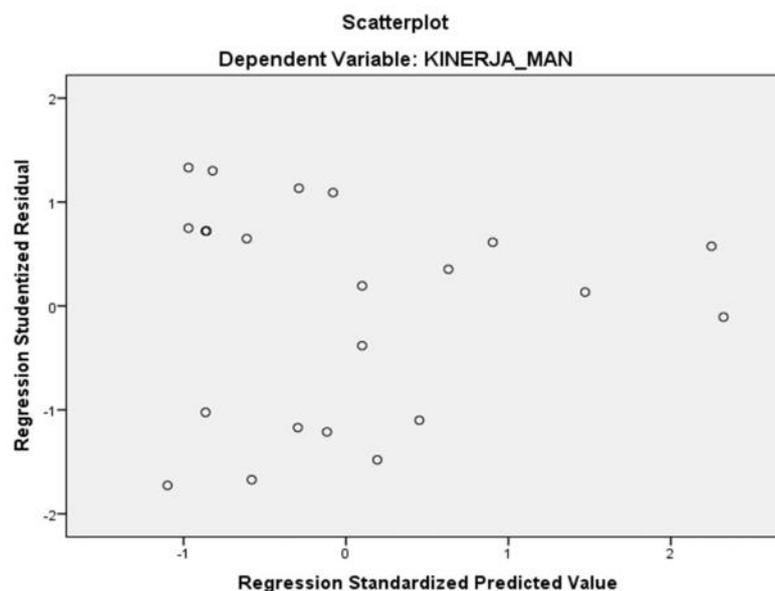
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.478	5.841		3.848	.001		
AUD_INVEST	.346	.111	.508	3.121	.004	1.000	1.000

Sumber: data olah (lampiran 5)

Dari table 5.10 di atas, dapat di lihat nilai *variable inflation factor* (VIF) sebesar 1.000 yang berada di bawah 10 ($VIF < 10$) dan nilai Tolerance sebesar 1.000, lebih dari 0.10 ($Tolerance > 0.10$). Dari ketentuan tersebut, dapat di simpulkan bahwa model regresi dalam peneliitan ini tidak terdapat masalah multi koleniaritas. Hal ini berarti bahwa pengujian di tingkat berikutnya bias di lakukan.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastis di gunakan untuk mengetahui ada tau tidaknya penyimpangan klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidak samaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterokedastisitas. (Dewi 2011) Hasil uji heterokedastisitas dapat di lihat pada gambar berikut ini.



Gambar 5.4
Grafik Scatter Plot

Sumber: data olah (lampiran 5)

Berdasarkan gambar 5.4 di atas dapat di lihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Hal ini berarti bahwa biasa di lakukan pengujian pada tingkat selanjutnya.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi

Uji hipotesis metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan dari terkontrol, maupun dari observasi (tidak terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin di sebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah di tentukan sebelumnya.

Tabel 5.11
Ringkasan Uji Regresi(uji hipotesis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22.478	5.841		3.848	.001
AUD_INVEST	.346	.111	.508	3.121	.004

Sumber : data olah(lampiran 5)

Dari tabel di atas, dapat dirumuskan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 22.478 + 0.346X + e$$

Pada table 5.11 tersebut di atas, dapat di lihat bahwa nilai signifikansi (sig) adalah 0.004, lebih kecil dari nilai alpha yang ditetapkan yakni 5% atau 0.05 (sig<alpha). Sementara nilai koefisien regresi menunjukkan nilai positif, yaitu 0.346. Berdasarkan hasil tersebut, dapat di simpulkan bahwa variabel X (Kemampuan Audit Investigatif Auditor BPKP) memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kemampuan Mendeteksi Kecurangan). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kemampuan auditor dalam melakukan audit investigatif yang dilakukan oleh BPKP, semakin tinggi pula atau semakin mudah auditor menemukan dan mendeteksi adanya tindak kecurangan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima.

b. *R square*(R^2)

Tabel 5.12
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.232	2.87053

Sumber : hasil olah data 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R Square*) sebesar 0.232 atau 23.2%. Hal ini berarti presentase kekuatan pengaruh variabel X (promosi) terhadap variabel Y (penjualan) dalam penelitian ini sebesar 23.2%. sementara itu, sisanya sebesar 76.8% ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian sudah bagus. Nilai *R-Square* masih terlihat rendah di sebabkan oleh karenanya terdapat dua variabel yang di teliti sehingga sangat lazim jika tingkat pengaruhnya tidak besar. Dengan di lakukan dengan penelitian selanjutnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari tabel 5.7 dapat di lihat bahwa jika angka korelasi yang di peroleh lebih besar dari pada angka kritik($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$) maka intrumen tersebut dikatakan valid.

Dari tabel 5.9 terlihat bahwa hasil perhitungan uji realibilitas menunjukkan alpha cronbach's lebih besar dari 0,6 maka dapat di nyatakan reliabel. Uji reabilitas di lakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya. Secara umum suatu instrumen dikatakan bagus jika memiliki koefisien cronbach's alpha $> 0,6$ maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang di lakukan oleh Dewi dan Ramantha (2016) meneliti tentang profesionalisme pengaruh kemampuan investigatif pada pembuktian kecurangan oleh auditor. Hasil penelitiannya data yang di kumpulkan melalui kuesioner yang di sebarakan secara langsung kekantor BPKP RI perwakilan provinsi Bali.

Hal ini sejalan dengan salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan sebagaimana di atur dalam Keputusan Peresiden Nomor 103 Tahun 2001 tetang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah berapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005.

Hasil penelitian ini berakitan dengan penelitian yang di lakukan oleh Pratiwi(2015) tentang pengaruh dan pengendalian investigatif terhadap

efektifitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*, yang berarti semakin meningkat kemampuan auditor investigatif maka semakin meningkat efektivitas suatu pelaksanaan prosedur audit dalam pengungkapan *fraud*.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil dari data yang di peroleh dapat di lihat bahwa kemampuan yang di milik auditor investigatif dalam melaksanakan audit investigasi dalam membuktikan adanya tindak kecurangan sangat efektif. Dari hasil analisis data yang di peroleh abhwa kemampuan auditor investigatif termasuk pada kategori sangat baik. Maka Hal ini terjadi karena auditor investigatif pada BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kemampuan-kemampuan yang meliputi kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental untuk melaksanakan audit investigasi dalam membuktikan kecurangan. Kemampuan auditor investigatif memiliki pengaruh yang kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan yaitu sebesar 0,508 atau 50,8%. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan auditor investigatif dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa hipotesis yang telah di tetapkan sebelumnya yaitu kemampuan auditor investigatif memiliki pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dapat diterima.

B. SARAN

Saran penulis untuk Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya dipertahankan atau bahkan di tingkatkan untuk memperkuat dan memperkokoh jaringan sistem pengendalian internal pemerintahan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kuatnya sistem pengendalian internal maka kasus dapat di cegah sekecil-kecilnya dan mudah untuk mengungkap siapa pelakunya dari kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat, 2003.*Efektivitas Organisasi, edisi pertama*. Jakarta: Erlangga.
- Agoes,Sukrisno. 2012. *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amrizal. 2012.*Kompetensi Auditor Forensik*. Warta Pengawasan
- Arens,Alvin.2008. *Auditing dan Jasa Assurance:Pendekatan Terintegrasi*. Terjemahan oleh Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setyo Budi. Jakarta: Erlangga.
- Asmaranti,Linrinasari,Annisya. 2016. *Pendeteksian Kecurang Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
- Augusty Ferdinan, 2006,*Metode penelitian manajemen:Pedoman Peneliti untuk Sripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*,Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dewi,Ramatha,2016.*Profesionalisme sebagai pengaruh kemampua investigatif kantor BPKP RI,perwakilan provinsi Bali*.
- Efendy, Muh Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Semarang: Program Studi MagisterSains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Ferry Anggriawan, Eko. 2014.*Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam MendeteksiFraud* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di DIY). Jurnal Nominal / Volume III Nomor 2 Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ferry Anggriawan, Eko. 2014.*Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam MendeteksiFraud* (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di DIY). Jurnal Nominal / Volume III Nomor 2 Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Handayani,(2009).*pengaruh pemeriksaan intern terhadap kecurangan*.
- Herman,2008.*pengaruh keadilias organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan*.

- Konrath, Larry F. 200
 2. *Auditing: A Risk Analysis Approach*. Fifth Edition. South-Western.
- Mulyadi Puradiredja. 2002. *Auditing*. Jilid 1. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Novitasari, Rustiarni. 2014. *Persepsi Auditor Atas Tingkat Efektivitas Red Flags Untuk Mendeteksi Kecurangan*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Nurharyanto. 2016. *Sistem Kendali Kecurangan (Fraud) Perbankan: Konsepsi, Asesmen Risiko dan Penerapan Kebijakan Anti-Fraud*. Jakarta: TintaCreative Production..
- Pratiwi, Inta. 2015. *Pengaruh Kemampuan Dan Pengalaman Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Fraud*. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Pusdiklatwas BPKP. 2010. *Penulisan Laporan Hasil Audit*. Makalah disajikan dalam Diklat Penjurangan Auditor Tim, Bogor.
- Pamudji, Widyastuti. 2000. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Prasetyo, Sandi. 2013. *Pengaruh Red Flags, Skeptisme Profesional Auditor, Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Pekanbaru, Padang, Dan Medan Yang Terdaftar Di IAPI 2013)*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru.
- Pamudji, Widyastuti. 2000. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud)*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahayu, Godono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan: Sebuah Riset Campuran dengan Pendekatan Sekuensial Eksplanatif*. Politeknik Negeri Pontianak. Simposium Nasional Akuntansi, XIX, Lampung
 Rahayu, Godono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan: Sebuah Riset Campuran dengan Pendekatan Sekuensial Eksplanatif*. Politeknik Negeri Pontianak. Simposium Nasional Akuntansi, XIX, Lampung.

- Setyaningrum, 2010. *Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Tanggung Jawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dan Kekeliruan Laporan Keuangan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya.
- Sulistyowati. 2003. *Peran Auditor dalam Mendeteksi Fraud untuk Mewujudkan Good Governance dan Good Corporate Governance di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik 4.
- Vidyana, Anisha. 2014. *Pengaruh Independensi, Beban Kerja. Dan Pengalaman Audit Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan(Fraud)*: Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Wusyagi,Nogoi,Pontoh,2012.*Analisis penerapan akuntansi forensik dan audit infestigatif terhadap pencegahan fraud.*
- Yusrianti, Hasni. 2015. *Pengaruh Pengalaman Audit, Beban Kerja, Task Specific Knowledge Terhadap Pendeteksian KecuranganLaporan Keuangan*.
- Yusrianti,(2012).*Pengaruh pengalan audit,beban kerja terhadap penetekisian kecurangan*.

L
A
M
P
I
R
A
N

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH KEAMPAMPUAN AUDITOR INVESTIGATIF TERHADAP EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROSEDUR AUDIT DALAM PEBUKTIAN KECURANGAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan tugas akhir di Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar, bersama dengan ini :

Nama :Nurhayati

Jurusan :Akuntansi

Prodi :Akuntansi

Saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang akan saya
lakukan dengan judul “Pengaruh kemampuan auditor investigatif terhadap
efektifitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam
penelitian ini dengan mengisi kuesioner ini sangat menentukan penelitian yang
saya lakukan.

Perlu saya sampaikan bahwa penelitian ini bersifat dan bertujuan akademis
atau keilmuan semata dan hasil penelitian atau laporan tidak disebarluaskan.
Besar harapan saya Bapak/Ibu berkenan mengisi kuesioner ini dengan lengkap.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nurhayati
105730 4486 13

I. IDENTITAS RESPONDEN

Untuk keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Bapak/Ibu/Saudari/i untuk mengisi data-data berikut dengan memberi tanda tick mark () pada jawaban yang telah tersedia.

Nama Responden : EMY KAMELIA

Jenis Kelamin : () Laki-laki () perempuan

Umur Responden : () 20 – 25 tahun () 26 – 35 tahun

Pendidikan Terakhir : () Dipoloma () S1
() S2 () S3

Jabatan : () Auditor Madya () Auditor Pelaksana
() Auditor Muda () Auditor Penyedia

Rata-rata penugasan yang dapat ditangani selama 1 tahun :

() < 10 penugasan () 10 – 20 penugasan () 21 – 30 penugasan

II. DAFTAR PERNYATAAN

Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab seluruh pernyataan dalam kuesioner ini. Berikan tanda () pernyataan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.

Pilihlah jawaban :

STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju, S = Setuju, SS = Sangat Setuju

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel X : Kemampuan Auditor Investigatif

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Sebagai seorang auditor Anda mampu untuk				

	menilai modus dan teknik yang bisa digunakan pelaku tindak kecurangan				
2.	Anda memahami karakteristik-karakteristik kecurangan yang melekat pada setiap tindak kecurangan secara baik				
3.	Anda melakukan penelusuran terhadap riwayat tindak kecurangan adalah kegiatan yang terlewatkan dalam penugasan audit				
4.	Selain bentuk-bentuk kecurangan, Anda juga dengan mudah mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat melakukan kecurangan				
5.	Anda mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecurangan, menjadi dasar bagi anda untuk memahami hambatan dalam pencarian ada/tidaknya tindak kecurangan				
6.	Saat Anda melaksanakan tugas audit, klien bersikap membantu dalam mengupulkan bukti-bukti yang ada				
7.	Anda memasukkan tahap-tahap identifikasi indikasi tindak kecurangan dalam program audit				
8.	Memerhatikan teknik-teknik audit investigasi dalam memperoleh bukti				
9.	Melakukan evaluasi secara kritis bukti-bukti audit				
10.	Dalam proses audit saya tidak mengabaikan kode etik independensi				
11.	Auditor harus mampu bekerja sama dalam tim				
12.	Saya akan mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia sebelum saya membuat keputusan				
13.	Saya cenderung untuk segera menerima apa yang orang lain katakan pada saya				
14.	Auditor harus menyadari bahwa beberapa temuan bersifat subjektif				
15.	Anda merahsiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang telah di peroleh				
16.	Anda akan menganalisis kasus sebelumnya agar menamba wawasan atas kasus yang akan datang				

Daftar Kuesioner Penelitian Variabel Y : Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan.

No.	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Anda melakukan pembuktian kecurangan dengan melaksanakan telaah atas pengendalian intern				
18.	Program audit yang telah disusun mempermudah Anda dalam pembagian tugas bagi tim audit investigasi				
19.	Dalam pelaksanaan audit investigasi dilakukan penelaah sesuai ketentuan/perundang-undangan yang berlaku				
21.	Laporan hasil audit investigasi yang Anda lakukan disusun dengan tepat waktu				
22.	Anda melakukan pemeriksaan dokumen termasuk informasi yang diolah kemudian disimpan secara elektronik (digital)				
23.	Anda meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada auditee				
24.	Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola resiko terjadinya kecurangan dengan tepat				
25.	Pelaksanaan pemeriksaan harus bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam menyediakan dokumen yang dibutuhkan) selama proses pemeriksaan				
26.	Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan, auditor bebas dari usaha pihak tertentu untuk mempengaruhi pertimbangan pemeriksa terhadap isi laporan pemeriksa				
27.	Auditor bebas dari intervensi pemimpin tentang prosedur yang dipilih auditor				
28.	Pemeriksaan bebas dari usaha-				

	usaha klien tentang obyek pemeriksaan untuk menentukan atau menunjuk kegiatan yang diperiksa				
29.	Dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan pelaporan auditor bebas dari bahasa atau istilah yang menimbulkan multi tafsir				
30.	Auditor bebas dari campur tangan pimpinan untuk menentukan, mengeliminasi atau memodifikasi bagian-bagian tertentu yang diperiksa				

Terimakasih atas kesediaan Bapak /Ibu mengisi kuesioner/angket yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat, secara khusus bagi saya sebagai mahasiswi yang sedang menyusun tugas akhir di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

RIWAYAT HIDUP



Nurhayati lahir di Dante Koa 18 juni 1995, dari pasangan suami istri Bapak Reli dan Ibu Tiha. Peneliti adalah anak ke Enam dari Enam bersaudara. Tinggal bersama dengan Kaka kandung. Memiliki hobbi main Gitar. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Sungguminasa/Gowa.

Pendidikan yang telah di tempuh oleh Peneliti yaitu SD Negeri 82 Dante Koa (2001-2007), MTS Guppi Dante Koa(2007-2010), SMA Negeri 1 Maiwa MAIWA (2010-2013), dan mulai tahun 2013 mengikuti Program S1 AKUNTANSI sampai sekarang dalam tahap penyusunan Skripsi untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Universitas Muhammadiyah Makassar.